



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI KOMPETENSI PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

IMPROVING VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY THROUGH THE COMPETENCE OF VILLAGE EQUIPMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND COMMUNITY PARTICIPATION

Sri Ayem¹, Nurul Ariyanti^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

*Email: nurulariyanti14@gmail.com

Keywords

Village Equipment Competence, Internal Control System, Community Participation, Accountability

Article informations

Received:
2023-03-02
Accepted:
2023-05-31
Available Online:
2023-07-17

Abstract

This study aims to examine and analyze the factors that influence the accountability of managing village funds. The population in this study was village officials in Kapanewon Sewon and Kapanewon Imogiri. The research sample was taken using a purposive sampling method based on Permendagri Number 20 of 2018. Data collection was carried out using a questionnaire and a sample of 96 village officials was obtained. The analysis used was multiple regression analysis using IBM SPSS version 26. The results showed that village apparatus competence had no effect on village fund management accountability, internal control systems and community participation had a positive effect on village fund management accountability. While simultaneously showing the competence of village officials, internal control systems and community participation have a positive effect on village fund management accountability. The implication of this research is that accountability for managing village funds can be realized by improving the internal control system and community participation through monitoring and evaluation as well as dissemination of village funds to the community.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat serta tujuan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Adanya Undang-Undang Desa ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengalokasikan dana desa (Jatmiko, 2020).

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa adalah



melalui pemberian dana desa dari APBN. Pemberian dana desa adalah bentuk nyata pemenuhan otonomi desa agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, demokrasi, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Pendanaan desa ini akan digunakan untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sebagai salah satu wujud keberhasilan dalam mengelola dana desa (Wardani *et al.*, 2021). Untuk itu pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan. Informasi yang dihasilkan harus bersifat andal, akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menunjukkan akuntabilitas yang baik.

Pada tahun 2021, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Desa Antikorupsi di Kampoeng Mataraman, Desa Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi tingginya dugaan penyimpangan dana desa di beberapa tahun terakhir (kompas.com). Berdasarkan kasus tersebut, masih ditemukan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Indikator akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tindakan penyelewengan dana desa yang terjadi akan berdampak pada pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

Sebagai informasi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Bantul memastikan besaran dana desa yang diterima setiap pemerintah desa beragam. Selama tiga tahun terakhir dana desa terbesar di Kabupaten Bantul diterima oleh Desa Selopamiro, Kapanewon Imogiri. Besaran dana desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 1.836.756.000. Tahun 2021 mendapatkan dana desa sebesar Rp1.850.990.723 dan tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp1.806.233.000 (www.peraturan.bpk.go.id). Berdasarkan kasus tersebut, besarnya dana desa yang diterima dapat meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi oleh perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak untuk membangun transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan kinerja suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Akuntabilitas meliputi kemampuan yang dimiliki perangkat desa dalam melaksanakan segala aktivitas berhubungan dengan pembangunan pemerintahan desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Shanti & Indarti, 2021). Pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai suatu bentuk kebutuhan transparansi guna memperkuat akuntabilitas atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah menilai akuntabilitas sebagai komponen penting untuk dimiliki guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala aktivitas yang dilakukan pemerintah (Widyatama *et al.*, 2017).

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang berkompoten. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Kompetensi merupakan keahlian dan tekad yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai posisinya dengan keunggulan yang didasarkan pada hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*) (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Perangkat desa diharapkan mampu mengelola dana desa untuk pembangunan di segala aspek dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Yoga & Wirawati, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah dibutuhkan sebuah sistem yang mampu memberikan keyakinan bahwa kegiatan pemerintah berjalan dengan baik dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ditetapkan. Sistem ini dinamakan sistem pengendalian internal, yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan dapat memberikan implikasi pada akuntabilitas serta transparansi (Shanti & Indarti, 2021). Dengan berjalannya sistem pengendalian internal yang terus menerus diharapkan akan

menghasilkan akuntabilitas pada laporan keuangan (Ayem & Kusumasari, 2020).

Akuntabilitas kembali diperkuat oleh peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat sebagai seseorang, kelompok, atau masyarakat yang terlibat dalam kontribusi atau memberikan sumbangan guna menunjang keberhasilan sebuah program (Wardani et al., 2021). Partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat (Yoga & Wirawati, 2020). Hal ini dapat meningkatkan responsivitas pemerintah daerah di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Shanti & Indarti (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian sebelumnya di Kota Semarang Barat sedangkan penelitian ini di Kabupaten Bantul, waktu penelitian tahun 2022 sedangkan peneliti sebelumnya tahun 2021 dan tidak menggunakan variabel komitmen organisasi pemerintah melainkan menambahkan variabel partisipasi masyarakat. Penelitian ini tidak menggunakan variabel komitmen organisasi pemerintah karena berdasarkan hasil penelitian Shanti & Indarti (2021) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi akan mempengaruhi produktivitas perangkat desa untuk bersedia berkerja keras sehingga komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara langsung. Penambahan variabel partisipasi masyarakat diambil dari penelitian Putra et al., (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, masyarakat dapat turut mengawasi aktivitas pemerintah mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga laporan keuangan semakin akuntabel. Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menarik untuk dilakukan mengingat masih banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi pada tujuan individu akan tetapi lebih menunjukkan sasaran pada kepentingan organisasi. Teori ini tepat digunakan pada instansi pemerintahan yang tidak berorientasi pada laba tetapi lebih mengarah pada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Teori *stewardship* mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang akan memberikan pengaruh baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat (Sari & Padnyawati, 2021).

Implikasi teori *stewardship* pada pemerintah desa (*steward*), sebagai lembaga pemerintahan yang dipercaya untuk melaksanakan tugas beserta fungsinya secara tepat dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat tercapai khususnya dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (Arfiansyah, 2020).

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi diartikan sebagai keahlian dan tekad yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai posisinya dengan keunggulan yang didasarkan pada hal yang



menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*) (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Sumber daya manusia yang kompeten, memahami tugas pokok, memahami perencanaan dan penganggaran keuangan desa, serta menyusun laporan keuangan desa dan mematuhi norma sosial dan aturan yang berlaku (Laksmi & Sujana, 2019). Dengan demikian akuntabilitas dana desa akan tercapai jika didukung oleh perangkat desa yang berkompoten (Ilmi & Mustofa, 2020)

Sejalan dengan teori *stewardship*, hubungan *steward* dan *principal* muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan *steward* untuk memberikan jasa dan kemudian menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada *steward*. Adanya kompetensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*principal*) kepada pemerintah desa (*steward*) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ayem & Fitriyaningsih (2022), Shanti & Indarti (2021), Susanti et al (2022) dan Putra et al., (2021) menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik akan melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati dan disiplin sehingga kinerja pemerintahan akan meningkat. Semakin tinggi kompetensi perangkat desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terkait mekanisme pengelolaan dana desa, dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin akuntabel. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Adanya sistem pengendalian internal akan mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga akan berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa (Ayem & Kusumasari, 2020). Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berbanding lurus, semakin tingginya penerapan sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Ayem & Nugroho, 2020).

Sejalan dengan teori *stewardship* pemerintah desa sebagai lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya serta membuat pertanggungjawaban keuangan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah desa (*steward*) dapat mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Shanti & Indarti, 2021).

Daniswara et al., (2022), Shanti & Indarti (2021) dan Ayem & Kusumasari (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi semua program sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Adanya tindakan tersebut dapat mengurangi risiko kecurangan dan akan meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi merupakan keikutsertaan sebagai seseorang, suatu kelompok, atau

masyarakat yang ikut serta dalam kontribusi atau memberikan sumbangan untuk menunjang keberhasilan sebuah program dalam berbagai partisipasi (Wardani et al., 2021). Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan saja namun juga mengidentifikasi segala kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Masyarakat harus dilibatkan dalam segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa sehingga dalam proses penyusunan, pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah berhak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa untuk melakukan evaluasi (Aprilya & Fitria, 2020).

Sejalan dengan teori *stewardship* bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini akan memicu tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja pemerintah desa apakah telah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Tanggapan atau masukan dari masyarakat akan berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, meningkatkan pembangunan, dan pengambilan keputusan di masa depan (Putri & Maryono, 2022).

Wardani et al., (2021), Sari & Padnyawati (2021) dan Putra et al., (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin masyarakat terlibat dalam proses perencanaan hingga pengawasan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin akuntabel. Masyarakat dapat memberikan usulan kepada pemerintah dan berhak untuk menolak kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan bersama. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh perangkat desa yang ada di wilayah Kapanewon Sewon dan Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, kriteria yang digunakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut.

1. Kepala desa
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang meliputi:
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan (Kaur), yang terdiri atas:
 - 1) Kaur Keuangan
 - 2) Kaur Tata Usaha dan Umum
 - 3) Kaur Perencanaan
 - c. Kepala Seksi (Kasi), yang terdiri atas:
 - 1) Kasi Pemerintahan
 - 2) Kasi Kesejahteraan
 - 3) Kasi Pelayanan

Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan total sampel sebanyak 96 orang perangkat desa.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah survei dengan metode penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pernyataan yang diberikan.



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan dalam pengukuran adalah skala ordinal 5 poin yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kompetensi Perangkat Desa

Menurut Ayem & Fitriyaningsih (2022) kompetensi diartikan sebagai keahlian dan tekad yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai posisinya dengan keunggulan yang didasarkan pada hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*). Indikator penelitian diambil dari penelitian yang dilakukan Ayem & Fitriyaningsih (2022) yang telah dimodifikasi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*). Terdiri dari 8 (delapan) pernyataan dengan skala ordinal 5 (lima) poin.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP. No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah poses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi dengan kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara, dan tertib peraturan perundang-undangan. Indikator penelitian diambil dari penelitian yang dilakukan Ayem & Kusumasari (2020) yang telah dimodifikasi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, pemantauan. Terdiri dari 9 (sembilan) pernyataan dengan skala ordinal 5 (lima) poin.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Wardani *et al.* (2021) partisipasi merupakan keikutsertaan sebagai seseorang, suatu kelompok, atau masyarakat yang ikut serta dalam kontribusi atau memberikan sumbangan untuk menunjang keberhasilan sebuah program dalam berbagai partisipasi. Indikator penelitian diambil dari penelitian Wardani *et al.* (2021) yang telah dimodifikasi yaitu pengambilan keputusan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Terdiri dari 8 pernyataan dengan skala ordinal 5 (lima) poin.

Akuntabilitas

Menurut Ayem & Fitriyaningsih (2022) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Indikator penelitian diambil dari penelitian Ayem & Fitriyaningsih (2022) yang telah dimodifikasi yaitu berdasarkan hukum dan kejujuran, kesesuaian prosedur, program dan kebijakan yang dilaksanakan dan ketepatan pelaporan keuangan. Pernyataan terkait akuntabilitas terdiri dari 8 (delapan) pernyataan dengan skala ordinal 5 (lima) poin.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk melihat tingkat signifikansi korelasi antara skor dari setiap butir pernyataan terhadap total skor setiap variabel (Arthana, 2019). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten hasil pengukuran dari variabel (Yesinia *et al.*, 2018). Pengujian realibilitas menggunakan formula *Cronbach's Alpha*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas bertujuan meneliti variabel bebas dan variabel berdistribusi secara normal. Pengujian Multikolinearitas tujuannya guna mengetahui hubungan semua variabel bebas dalam model regresi. Nilai VIF < 10 maupun *tolerance* > 0,10 artinya tidak terdapat multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui secara parsial (terpisah) variabel independen tanpa pengaruh variabel lain. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Kompetensi Perangkat Desa
- X_2 = Sistem Pengendalian Internal
- X_3 = Partisipasi Masyarakat
- ε = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan menggunakan *pearson correlation* yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel dengan nilai signifikansi 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan valid. Pada penelitian ini diperoleh nilai r tabel dengan derajat bebas (df) 96 adalah 0,199. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ artinya pernyataan pada penelitian dikatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kompetensi Perangkat Desa	0,420-0,766	0,199	Valid
Sistem Pengendalian Internal	0,647-0,765	0,199	Valid
Partisipasi Masyarakat	0,637-0,834	0,199	Valid
Akuntabilitas	0,580-0,856	0,199	Valid

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS (2022)

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 artinya pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dikatakan reliabel karena memenuhi syarat uji. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Perangkat Desa	0,809	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,852	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,895	Reliabel
Akuntabilitas	0,837	Reliabel

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS (2022)



Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 3 menunjukkan nilai *asymptotic* sebesar $0,090 > 0,05$. Dengan demikian, hasil penelitian dinyatakan diterima karena hasil data yang dianalisis memenuhi kriteria uji normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	1.53050688
Most Extreme Differences	Absolute	0.084
	Positive	0.084
	Negative	-0.066
Test Statistic		0.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.090 ^c

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS (2022)

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas disajikan pada Tabel 4

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Perangkat Desa	0.464	2.155	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0.406	2.463	Tidak terjadi multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	0.792	1.263	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS (2022)

Pengujian multikolinearitas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $VIF < 10$ atau nilai toleransi $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* variabel kompetensi perangkat desa sebesar 0,464, variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,406, dan variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,792. Variabel tidak terjadi multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Koefisien Determinasi

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.745 ^a	0.555	0.540	1.555

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS (2022)

Berdasarkan hasil pengujian determinasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R – Square* sebesar 0,540 artinya pengaruh kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pada perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 54%.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.125	2.138		2.397	0.019
Kompetensi Perangkat Desa	0.087	0.082	0.109	1.068	0.288
Sistem Pengendalian Internal	0.322	0.078	0.453	4.147	0.000
Partisipasi Masyarakat	0.200	0.047	0.329	4.210	0.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS (2022)

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terdukung sehingga kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari pengujian diperoleh nilai signifikansi $0,288 > 0,05$ dan $t_{hitung} 1,068 < t_{tabel} 1,986$.

Kompetensi perangkat desa dalam penelitian ini hanya mengukur pengetahuan, keahlian dan sikap. Kurang efektifnya sistem pembinaan pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana desa menyebabkan perangkat desa kurang memahami mekanisme pengelolaan dana desa. Selain itu juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan perangkat desa yang sebagian memiliki latar belakang pendidikan SLTA. Respon pada kuesioner terdapat perangkat desa yang menjawab tidak setuju pada pernyataan mengenai tingkat pemahaman mekanisme pengelolaan dana desa sehingga mempengaruhi variabel kompetensi perangkat desa. Hal ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* yang menekankan bahwa pengelola keuangan desa tidak termotivasi pada tujuan individu melainkan mementingkan tujuan organisasi. Dalam hal ini *steward* (pemerintah desa) bertanggungjawab terhadap *principal* (masyarakat). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya pemahaman dan terbatasnya pengetahuan dari perangkat desa tidak mampu menciptakan motivasi pengelola keuangan desa demi tujuan bersama. Pemerintah desa (*steward*) tidak mampu menciptakan akuntabilitas dana desa dan masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan akuntabilitas dana desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Fitriyaningsih (2022), Shanti & Indarti (2021) dan Putra *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terdukung sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} 4,147 > t_{tabel} 1,986$.

Semakin optimal suatu sistem pengendalian internal maka akan semakin akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Implementasi sistem pengendalian internal pada pemerintah desa akan memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan penyelenggaraan negara dengan efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset dan ketaatan terhadap



peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat mempercepat pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan desa. Sesuai dengan teori *stewardship*, *steward* (pemerintah desa) dapat mengerahkan kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniswara *et al.*, (2022) Shanti & Indarti (2021) dan Ayem & Kusumasari (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terdukung sehingga partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} 4,210 > t_{tabel} 1,986$.

Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin meningkat. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan alokasi dana desa, mengajukan rencana alternatif kepada BPD, terlibat aktif dalam rapat paripurna, dan melakukan pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan teori *stewardship*, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa akan memicu tanggapan dari masyarakat berupa penilaian terhadap segala kegiatan dan kinerja pemerintah desa. Tanggapan dari masyarakat akan berguna untuk meningkatkan kinerja, pembangunan dan pengambilan keputusan di masa depan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al.*, (2021), Sari & Padnyawati (2021) dan Putra *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal dinyatakan sebagai tolak ukur dan standar pengendalian keuangan desa untuk memastikan seluruh aktivitas pemerintah berjalan sesuai dengan tujuannya. Pemerintah desa harus meningkatkan sistem pengendalian internal melalui kejelasan struktur organisasi, adanya perhatian khusus terhadap berbagai risiko dan rutin melakukan monitoring serta evaluasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan tindak korupsi dana desa. Masyarakat dapat memantau pertanggungjawaban pemerintah desa yang dipublikasikan di media massa (website) sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat. Adapun keterbatasan penelitian ini ialah: (1) Penelitian ini hanya sebatas tiga variabel independen, yaitu kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dan satu variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sehingga data yang diperoleh belum bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena responden yang tidak objektif atau kurang memahami pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini dan memperluas objek penelitiannya dan menggunakan metode lain selain kuesioner seperti wawancara kepada pihak yang mengelola dana desa agar diperoleh data yang lebih detail dan luas dengan ruang lingkup

yang lebih besar.

REFERENSI

- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi ISSN.*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160–169. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 27–40. <https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.89>
- Daniswara, A. A., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Analisis Determinan Akuntabilitas Dana Desa. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 780–792.
- Ilmi, M., & Mustofa. (2020). Determinants of Village Fund Management in Improving Village Development and Economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(1), 31–42. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i1.31-42>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(38), 107–121.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Putra, R. D., Wibowo, R. E., & Nurcahyono, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2), 110–122. <https://doi.org/10.26714/mki.11.2.2021.110-122>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1). <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Sari, N. M. R., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Shanti, N. P., & Indarti, M. G. K. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa:



- Studi Kasus Aparat Pemerintah Kecamatan Semarang Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/37011>
- Susanti, S., Basri, Y. M. ., & Rasuli, M. . (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa Dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Siak Provinsi RIAU). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 254–277. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7267552>
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 1–16. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5562>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Yoga, I. K. S., & Wirawati, N. G. P. (2020). Accountability Analysis of Village Fund Management. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(5), 32–39. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/05/E20453239.pdf>